

**MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019
(Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)**

(Skripsi)

Oleh :

SENDY NUR AHMAD EFFENDI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)

Oleh

Sendy Nur Ahmad Effendi

Penelitian ini dilatar belakangi dengan tingginya angka golput pada pemilu legislatif di Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2019 sebanyak 56,56%, oleh karena itu dilaksanakannya kegiatan Pendidikan politik oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah. Partai politik dianggap mampu dalam mengatasi permasalahan ini karena mengingat partai politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan warga negara juga berhak menerima pendidikan politik tersebut agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja model pendidikan politik yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan perolehan suara pada pemilu legislatif 2019. Metode dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah model pendidikan politik yang diberikan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan perolehan suara terbagi dalam dua sifat kegiatan yaitu formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal seperti kaderisasi, konsolidasi internal dan seminar. Sedangkan pendidikan politik yang bersifat informal meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik, konsolidasi eksternal, dan serta melakukan sarasehan pendidikan.

Kata Kunci: Pendidikan politik, Partai politik, Partisipasi, Pemilu

ABSTRACT

POLITICAL EDUCATION MODEL IN IMCREASING VOTES IN THE 2019 LEGISLATIVE ELECTIONS (Study On The PDI-Perjuangan Central Lampung DPC)

By

Sendy Nur Ahmad Effendi

This research was motivated by the high number of abstentions in the legislative elections in Central Lampung Regency in 2019 of 56.56%, therefore political education activities were carried out by the PDI-Perjuangan DPC in Central Lampung Regency. Political parties are considered capable of overcoming this problem because considering that political parties have a function as a means of political education, namely providing political education to every citizen and citizens also have the right to receive political education so that they become citizens who are aware of their rights and obligations. This study aims to find out what models of political education are carried out by the PDI-Perjuangan DPC in Central Lampung Regency in increasing vote acquisition in the 2019 legislative elections. The method in this study is a descriptive method with a qualitative approach. The result of this study is that the political education model provided by the PDI-Perjuangan DPC in Central Lampung Regency in increasing vote acquisition is divided into two types of activities, namely formal and informal. Formal political education such as regeneration, internal consolidation and seminars. Meanwhile, political education that is informal in nature includes outreach activities to the public about political education, external consolidation, and also conducting educational workshops.

Keywords: Political education, political parties, participation, elections

**MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM MENINGKATKAN
PEROLEHAN SUARA PADA PEMILU LEGISLATIF 2019
(Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)**

Oleh

SENDY NUR AHMAD EFFENDI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul

: **MODEL PENDIDIKAN POLITIK DALAM
MENINGKATKAN PEROLEHAN SUARA
PADA PEMILU LEGISLATIF 2019 (Studi
Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)**

Nama Mahasiswa : Sendy Nur Ahmad Effendi

No Pokok Mahasiswa : 1846021007

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



MENYETUJUI
1. **Komisi Pembimbing**

Himawan Indrajat, S.IP, M.SI.
NIP. 198307272009121009

Bendi Juantara, S.IP, M.A
NIP. 19880923201903011

2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P
NIP. 19611218198902100

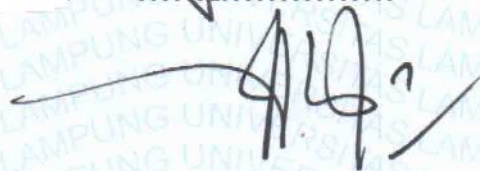
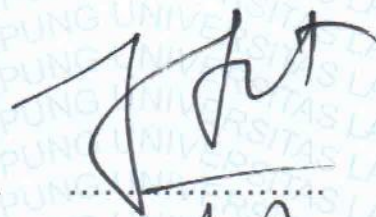
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Himawan Indrajat, S.IP, M.SI.**

Sekretaris : **Bendi Juantara, S.IP, M.A**

Penguji : **Budi Harjo, S.Sos., M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 196108071978032001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Februari 2023
Yang Membuat Pernyataan



Sendy Nur Ahmad Effendi
NPM. 1846021007

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sendy Nur Ahmad Effendi, tempat tanggal lahir Gunung Sugih 25 Maret 2000. Jenjang pendidikan Penulis dimulai pada tahun 2007-2012 di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gunung Sugih. Setelah lulus Sekolah Dasar Negeri (SDN), pada tahun 2012-2015 Penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Gunung Sugih. Selanjutnya pada tahun 2015-2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Gunung Sugih. Kemudian pada tahun 2018 Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN).

Selama Penulis melaksanakan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non-akademik demi menunjang kapasitas diri Penulis. Pada tahun 2019-2020, Penulis menjadi bagian dari Anggota Hubungan Masyarakat pada Forum Studi Pengembangan Islam (FSPI).

Demikian sekelumit aktivitas Penulis pada masa perkuliahan, sejak rentang tahun 2018-2023. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha merupakan kinerja Penulis yang bertujuan sebagai jalan menuju hidup yang lebih bermanfaat.

MOTTO

“Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Dengan
Kesanggupannya”

(QS Al-Baqarah: 286)

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa
usahanya akan kelihatan nantinya”

(Q.S An-Najm Ayat 39-40)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum
mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

(Q.S Ar Rad 11)

“Prosesnya mungkin ga mudah tapi endingnya bikin ga berhenti bilang
alhamdulillah”

(Sedy Nur Ahmad Effendi)

PERSEMBAHAN



Alhamdulillahirabbil'alamiin segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah meridhai segala ikhlar hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan

Shalawat teriring salam, selalu tucurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang selalu dinantikan syafa'atnya di Yaumul Akhir

dan

Ku persembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

Ibu dan Ayah tercinta

Lasmini dan Ruslan Effendi

Yang tak henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa demi keberlangsungan Anakmu menjalani hidup, beribu terimakasih tak dapat membalas semua jasmu demi membesarkan putri tersayang menjadi insan yang berguna.

Terimakasih untuk semua yang mendo'akan dan mendukung selesainya skripsi ini, semoga segala kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur Penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah)”. Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah tergores dalam sejarah memberikan inspirasi dan teladan yang luar biasa bagi umat manusia dan peradabannya, serta telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang sampai saat ini.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang Penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada, tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik.

Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Kepada Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf atas segala nikmat-Mu. Terima kasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap

2. proses hidup yang hamba jalani, terimakasih atas kebesaran-Mu yang selalu memberikan kedamaian jiwa, serta hati yang lapang dalam menempuh kesulitan dihadapi.
3. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung
4. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
5. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.I.P. selaku Pembimbing Akademik (PA) dan selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan untuk membawa jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi nomor satu.
6. Bapak Himawan Indrajat., S.IP,M.SI., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi Penulis, sehingga skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih pak, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah bapak dan selalu diberikan kesehatan.
7. Bapak Bendi Juantara, S.I.P, M.A. selaku Dosen Pembimbing Kedua. Terima kasih atas segala saran, kritik, dan motivasi dan segala bimbingan yang luar biasa yang sangat membantu Penulis dalam proses penulisan skripsi Penulis, sehingga skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih bu, semoga Allah SWT selalu melindungi langkah ibu dan selalu diberikan kesehatan.
8. Bapak Budi Harjo, S.Sos., M.IP. selaku Dosen Pembahas. Terima kasih atas segala saran dan kritik yang luar biasa yang sangat membantu dalam proses penulisan skripsi Penulis sehingga saat ini skripsi Penulis terselesaikan dengan baik. Terima kasih banyak pak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan perlindungan untuk bapak beserta keluarga.
9. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung meski tak dapat disebutkan namanya satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua.

Penulis sangat bersyukur dapat diajarkan oleh bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam hidup Penulis.

10. Staff Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mbak Shella, Bang Puput, dan Bang Puput. Terima kasih sudah bersedia direpotkan dalam urusan administrasi perkuliahan, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah SWT.
11. Ketua DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah, Ketua KPU Kabupaten Lampung Tengah, dan Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. (Terima kasih telah bersedia dan meluangkan waktunya sebagai informan dalam penelitian ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan membalas semua kebaikan yang telah diberikan.
12. Kepada orangtua tercinta, Ibu Lasmini dan Ayah Ruslan Effendi. Terima kasih untuk segala do'a yang telah dicurahkan untukku, serta untuk kerja kerasnya untuk menjadikan Penulis menjadi insan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat bagi orang lain. Ucapan terimakasih tidak mampu membalas semua tetesan keringat dan do'a yang tak berhenti terpanjat untuk membesarkan putramu tersayang menjadi seseorang yang berguna sesuai dengan harapan. Bersimpuh maaf atas kesalahan yang pernah terwujud, dan maaf untuk air mata yang pernah keluar atas tindakanku. Berjuta terima kasih tidak akan terbalas untuk semua jasa Ibu dan Ayah. Semoga setiap langkahku membawa kebaikan dan kebahagiaan untuk Ibu dan Ayah, serta ilmu yang didapat dari pendidikanku dapat bermanfaat bagi orang lain dan dapat menjadi amal jariyah untuk Ibu dan Ayah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan perlindungan dimanapun Ibu dan Ayah berada, dan semoga keberhasilan dalam hidup senantiasa Allah SWT berikan dalam hidupku agar diriku dapat terus menciptakan senyum bahagia di wajah Ibu dan Ayah tersayang.
13. Untuk Ade Sonia Pratiwi, terima kasih banyak karena berkat dan bantuannya Skripsi ini dapat sangat terbantu dan Skripsi ini bisa Selesai, Terima kasih sudah menjadi penyemangat disaat peneliti merasa Lelah, terima kasih sudah menjadi tempat dimana peneliti merasa Lelah disaat mengerjakan skripsi, Hanya allah yang bisa membalas semua kebaikan nia, sekali lagi terima kasih banyak.

14. Untuk adik-adik ku Riski dan Raka semoga kita semua bisa jadi orang yang sukses dimasa yang akan datang, jadi orang yang sayang sama orang tua, bisa jadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, aamiin.
15. Teman-teman jurusan Ilmu Pemerintahan, Redo, Fran, Hani, Adis, Diana, Gilang, Fera, Nida, Nikita dan yang lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah memberikan banyak kenangan berharga.
16. Terkhusus buat Redo dan Frans Trimakasih sudah maudirepotkan dalam pengerjaan skripsi ini, maaf kalo sekiranya peneliti banyak merepotkan dalam berkas-berkas ataupun hal lain. Terima kasih
17. Teman Teman semasa Sekolah SMAN 1 Gunung Sugih (Ferdian, Tengku, Agung Herman, dan Alm Aditya Saputra). Terima kasih ya kawan kalian selalu ada disaat saya gundah gulana, terima kasih udah menjadi teman terbaik saya selama ini, walaupun sekarang kita udah tidak bisa berkumpul seperti dulu lagi kalian tetap jadi rumah kedua bagi saya. Terima kasih teman.
18. Terima kasih buat Om Dedy, Cicik Yuli, safna dan fais, Terima kasih sudah menerima sendy dengan baik selama tinggal disana, maaf jika perilaku peneliti kurang sopan saat berada disana, terima kasih karena telah mendukung sendy dari awal kuliah sampai akhir dalam mencapai gelar Sarjana ini,
19. Penulis ingin berterima kasih kepada saya Sendy Nur Ahmad Effendi, karena telah melakukan semua kerja keras ini, terima kasih telah berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan pada Penulis. Akhir kata Penulis menyadari, masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi Penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 16 Februari 2023

Sendy Nur Ahmad Effendi

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Tentang Pendidikan Politik.....	13
2.1.1 Pengertian Pendidikan Politik.....	13
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik	14
2.1.3 Model Pendidikan Politik	19
2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi.....	22
2.2.1 Pengertian Partisipasi.....	22
2.2.2 Pengertian Partisipasi Politik	22
2.2.3 Jenis-jenis Partisipasi Politik	23
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi	25
2.3 Tinjauan Tentang Pemilu	26
2.3.1 Pengertian Pemilu	26
2.3.2 Hak Pilih dalam Pemilu	27
2.3.3 Kampanye dalam Pemilu	28
2.4 Tinjauan Tentang Partai Politik	29
2.4.1 Pengertian Partai Politik	29
2.4.2 Tujuan dan Fungsi Partai Politik.....	31
2.5 Kerangka Fikir	33

III. METODE PENELITIAN	36
3.1 Tipe Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian.....	37
3.3 Lokasi Penelitian.....	38
3.4 Fokus Penelitian.....	38
3.5 Sumber Data.....	40
3.6 Informan Penelitian.....	41
3.7 Teknik Pengumpulan Data.....	42
3.8 Teknik Pengolahan Data	44
3.9 Teknik Analisis Data.....	44
3.10 Teknik Validitas Data	47
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	48
4.1 Gambaran Umum DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah	48
4.1.1 Sejarah PDI-Perjuangan.....	48
4.1.2 Profil DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	49
4.1.3 Struktur dan Komposisi DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah...	50
4.1.4 Visi dan Misi PDI Perjuangan	51
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	55
5.1 Hasil Penelitian Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Pada DPC PDI- Perjuangan Lampung Tengah).....	55
5.1.1 Pendidikan Politik Formal	56
5.1.2 Pendidikan Politik Informal	67
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	91
6.1 Simpulan	91
6.2 Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Anggota DPRD Lampung Tengah Periode 2019-2024	4
1.2 Pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Tengah dibagi Kedalam 5 (Lima) Daerah Pemilihan.....	6
1.3 Rekapitulasi Suara DPRD Pemilu Legislatif Untuk Fraksi PDI- Perjuangan Se-Kabupaten Lampung Tengah 2019.....	6
1.4 Penelitian Terdahulu	8
4.1.3 Struktur dan Komposisi DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah.....	50
5.1 Model Pendidikan Politik.....	76
5.2 Perolehan Suara dan Kursi DPRD Kabupaten Lampung Tengah Priode Tahun 2014-2019 dan Tahun 2019-2024.....	79
5.3 Triangulasi Data Penelitian	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Diagram Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif 2019	3
2.1 Kerangka Pikir	35
5.1 Pelaksanaan Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Oleh DPC PDI- Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	61
5.2 Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Internal yang Dilakukan Oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	64
5.3 Pelaksanaan Kegiatan Seminar yang Dilakukan Oleh DPC PDI- Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	66
5.4 Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi yang Dilakukan Oleh DPC PDI- Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	69
5.5 Pelaksanaan Kegiatan Konsolidasi Eksternal yang Dilakukan Oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	72
5.6 Pelaksanaan Kegiatan Sarasehan yang Dilakukan Oleh DPC PDI- Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah	75

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Partai politik memiliki tugas memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, pendidikan politik diarahkan pada pembentukan pribadi manusia sebagai partisipasi politik yang baik dan aktif (Rusadi Kantraprawira, 1988:54). Penyelenggaraan pendidikan politik diharapkan dapat menjadi proses pemahaman politik yang baik bagi masyarakat sebagai warga negara, dengan dasar pemahaman politik yang baik masyarakat akan dapat berpartisipasi dan berperan secara aktif di dalam membangun kehidupan bernegara, dengan demikian pendidikan politik dapat dijadikan dasar untuk mendorong partisipasi politik. Mengingat keadaan yang terjadi dimasyarakat sekarang ini partisipasi yang penuh dan bertanggung jawab dari rakyat itu tidak bisa berlangsung secara otomatis, hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat yang masih serba keterbelakangan dan ketidak tahuan akan politik. DPC PDI-Perjuangan di Kabupaten Lampung Tengah adalah partai yang sering bersentuhan langsung dengan masyarakat bukan tidak mungkin jika DPC PDI-Perjuangan dapat memanfaatkan momentum ini guna menarik suara di Lampung Tengah dan juga mensosialisasikan tentang visi misi partai PDI-Perjuangan. Tidak hanya itu DPC PDI-Perjuangan di Lampung Tengah mempunyai peluang terbuka untuk melakukan pendidikan politik. Pendidikan politik merupakan hal yang sangat penting untuk mengurangi jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu yang akan datang.

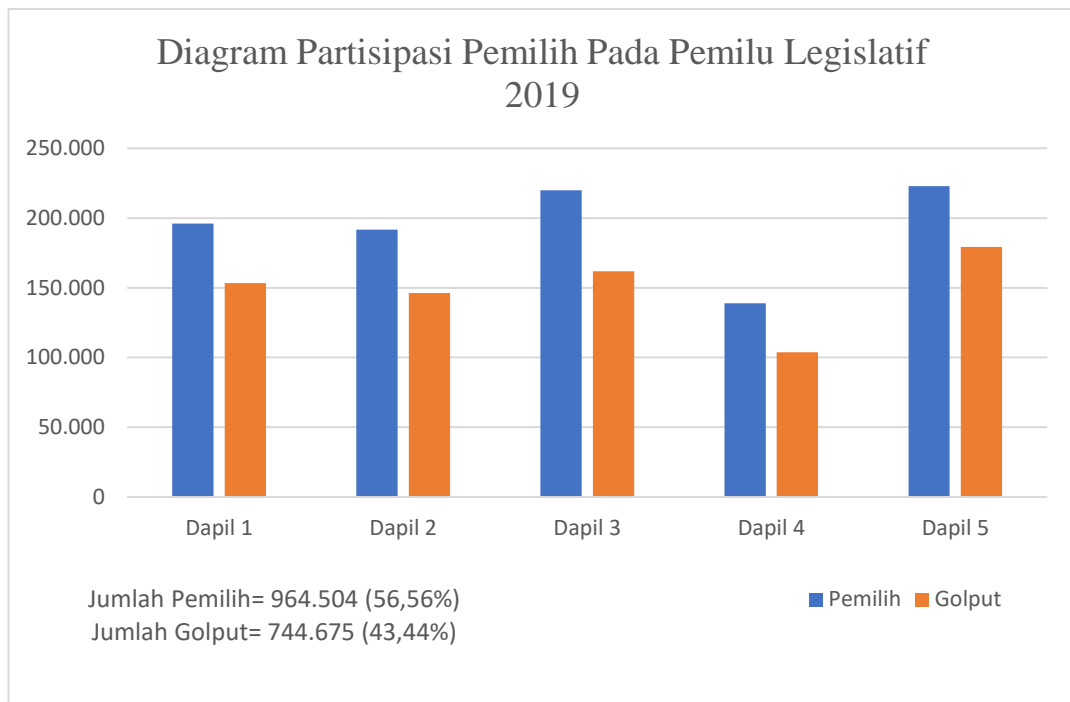
Pendidikan Politik yang diberikan oleh DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Lampung Tengah terbagi dalam dua sifat kegiatan yaitu formal dan informal. Pendidikan Politik yang bersifat formal seperti kaderisasi, konsolidasi internal dan seminar. Sedangkan Pendidikan Politik yang bersifat informal meliputi kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan politik, konsolidasi eksternal, dan serta melakukan sarasehan pendidikan.

Pendidikan politik tersebut bertujuan untuk menanamkan ideologi, konsolidasi internal maupun eksternal partai, pemahaman terhadap tahapan dan aturan pemilu serentak. Strategi pelaksanaan Pendidikan Politik PDI-Perjuangan di Kabupaten Lampung Tengah melalui kader yang duduk di kursi perlemen bertemu dengan kelompok anak muda, kelompok doa, kelompok tani, dan komunikasi politik dengan masyarakat untuk melihat, mendengar dan memberi solusi terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam prakteknya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melaksanakan peran dan fungsi partai, yakni sosialisasi terkait memberi pendidikan politik. Pendidikan politik ini dalam bentuk mengajarkan kepada publik (masyarakat) tentang bagaimana seharusnya masyarakat menentukan pemimpin dan wakil-wakil rakyat se-obyektif mungkin. Selain itu, menentukan pilihan atas dasar pertimbangan bahwa kandidat yang dipilih telah di ketahui track record nya. Sehingga dalam perjalanannya kandidat tersebut apa bila telah menjabat akan menghasilkan kebijakan yang didasarkan atas pertimbangan rakyat.

Namun pada realitanya di Indonesia fungsi pendidikan politik ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang masih belum bisa memandang bahwa pemilu adalah suatu hal yang penting diikuti. Dapat dilihat besarnya angka non voting/golput pada pemilihan legislatif di Indonesia tinggi. Berdasarkan data menunjukkan bahwa angka golput pemilihan legislatif tahun 2019 yaitu 29,68%, dengan jumlah suara sah 139.971.260. *(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022)*

Disisi lain angka golput di Kabupaten Lampung Tengah pada pemilu tahun 2019 masih tinggi. Berdasarkan data KPU Lampung Tengah, jumlah Pemilih sebanyak 1.714.179, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak, 969.504 (56,56%) sedangkan yang tidak menggunakan hak pilih yaitu 744.675 (43,44%). (KPU Kabupaten Lampung Tengah). Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa tingkat partisipasi dalam pemilihan legislatif Lampung Tengah pada tahun 2019 masih jauh dari target yang diharapkan oleh KPU khususnya daerah Kabupaten Lampung Tengah



Gambar 1.1 Diagram Partisipasi Pemilih pada Pemilu Legislatif 2019
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Pasal 10 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik di atas disebutkan, sebagai partai politik diwajibkan untuk melaksanakan fungsinya secara konstitusional dengan memberikan pendidikan politik bagi anggota serta masyarakat luas.

Kewajiban partai politik tersebut didasari oleh Pasal 334 ayat 3a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebaaimana yang dimaksud pada ayat 3 di prioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik terhadap masyarakat harusnya dapat dilakukan secara optimal oleh partai politik, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) hanya memberikan perubahan dan peningkatan kesadaran politik masyarakat.

Di Kabupaten Lampung Tengah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menjadi partai politik yang dominan. Hal tersebut terbukti dengan hasil pemilu anggota legislatif tanggal 2 September 2019, itu terdiri atas PDI-Perjuangan 11 (sebelas) kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar dengan jumlah kursi 9 (sembilan), Partai Demokrat yang meraih 5 (Lima) kursi, lalu Partai Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem dengan masing-masing 6 (enam) kursi, Partai Keadilan Sejahtera 5 (lima) kursi, Partai Amanat Nasional dan Perindo masing-masing 1 (Satu) kursi di Parlemen.

Tabel 1.1 Daftar Anggota DPRD Lampung Tengah Periode 2019-2024

No	Nama	Fraksi	Jabatan
1	Sumarsono	PDI-P	Ketua
2	Lambok Nainggolan, S.Si	PDI-P	Anggota
3	Agus Hamid, S.Sos	PDI-P	Anggota
4	Aida, S.IP	PDI-P	Anggota
5	Sutarmin	PDI-P	Anggota
6	Kadek Joko Supriyatin, S.Ap	PDI-P	Anggota
7	Wayan Eka Maherda	PDI-P	Anggota
8	Ni Made Winarti, S.E	PDI-P	Anggota
9	Ikade Asian Nafiri	PDI-P	Anggota
10	I Wayan Dama, A.Md	PDI-P	Anggota
11	Hakki	PDI-P	Anggota
12	Yulius Heri Susanto, SE	Golkar	Wakil Ketua I
13	Sugimin, S.Pd.I	Golkar	Anggota
14	Umar	Golkar	Anggota
15	Dra. Yurita	Golkar	Anggota
16	Husnul Huda	Golkar	Anggota
17	Ariswanto, SE	Golkar	Anggota
18	Agus Suwandi	Golkar	Anggota
19	Drs. I Nyoman Suryana	Golkar	Anggota
20	Purismo	Golkar	Anggota
21	Hi. Indra Jaya	Demokrat	Anggota
22	Hi. Singa Ersa Awangga	Demokrat	Anggota
23	Najamudin	Demokrat	Anggota
24	Toni Sastra Jaya, SH.MH	Demokrat	Anggota
25	Baroji	Demokrat	Anggota
26	Wayan Sudane Martayasa	Nasdem	Anggota
27	Hanapiah	Nasdem	Anggota

28	Fian Febriano, SH	Nasdem	Anggota
29	Muhammad Idris, ST	Nasdem	Anggota
30	Rizani Andi Wijaya, A.Md	Nasdem	Anggota
31	Yunisa Putra	Nasdem	Anggota
32	Hi, Firdaus Ali, S.Sos	Gerindra	Wakil Ketua II
33	Saenul Abidin	Gerindra	Anggota
34	Hendri Farizal	Gerindra	Anggota
35	Muhammad Saleh Mukadam, SH	Gerindra	Anggota
36	Revi Feruzi Armanda, SH	Gerindra	Anggota
37	Deni Satria Negara	Gerindra	Anggota
38	Muslim Anshori, SH.I	PKB	Wakil Ketua III
39	Cecep Jamani, S.Si	PKB	Anggota
40	K.H. Slamet Anwar, S.Pd.I	PKB	Anggota
41	Hi. Wagimin, S.Ag	PKB	Anggota
42	Hj.Meri Andriyani	PKB	Anggota
43	Ashari, S.Pd	PKB	Anggota
44	Hi. Joni Hardito, ST.MT	PKS	Anggota
45	Muhammad Ghofur, S,Si	PKS	Anggota
46	Agus Triono, SE	PKS	Anggota
47	Purwanto, SE	PKS	Anggota
48	Jauhary Subing, SE	PKS	Anggota
49	Rasid Effendi, SE	PAN	Anggota
50	Majar Fitri	Perindo	Anggota

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti 2022)

Tingginya perolehan kursi partai PDI-Perjuangan tidak berbanding lurus dengan tingginya partisipasi politik masyarakat Lampung Tengah. Selayaknya sebagai partai politik yang dominan seharusnya PDI-Perjuangan mampu memantapkan kesadaran politik masyarakat. Dengan demikian keberadaan partai politik membuktikan kepada masyarakat bahwa, partai politik punya peran untuk terus berkontribusi secara berkesinambungan untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya memberikan pendidikan politik kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Mengingat semakin banyaknya pandangan masyarakat yang kritis bahkan skeptis terhadap partai politik yang menyatakan bahwa partai politik sebenarnya tidak lebih dari pada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan nafsu untuk kekuasaannya sendiri.

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 adalah ajang dimana kemampuan partai PDI-Perjuangan untuk memberikan proses pendidikan politik kepada masyarakat Kabupaten Lampung Tengah. Adapun hasil dari perolehan suara dalam Pemilu Legislatif untuk fraksi PDI-Perjuangan Se-Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019. Berikut ini peneliti lampirkan perbandingan data perolehan Suara DPRD fraksi PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah :

Tabel 1.2 Pemilihan DPRD Kabupaten Lampung Tengah dibagi Kedalam 5 (Lima) Daerah Pemilihan

Nama Dapil	Wilayah Dapil
Dapil 1	Gunung Sugih, Punggur, Seputih Raman, Seputih Banyak, Kota Gajah, Way Seputih.
Dapil 2	Rumbia, Seputih Surabaya, Bandar Mataram, Bumi Nabung, Bandar Surabaya, Putra Rumbia.
Dapil 3	Kali Rejo, Bangun Rejo, Trimurjo, Bumi Ratu Nuban, Bekri, Sendang Agung.
Dapil 4	Padang Ratu, Pubian, Selagai Lingga, Anak Tuha, Anak Ratu Aji.
Dapil 5	Terbanggi Besar, Seputih Mataram, Terusan Nunyai, Seputih Agung, Way Pengubuan.

(Sumber :Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Tabel 1.3 Rekapitulasi Suara DPRD Pemilu Legislatif Untuk Fraksi PDI-Perjuangan Se-Kabupaten Lampung Tengah 2019

Dapil	Kecamatan	Total Prolehan Suara	Jumlah kursi yang diperebutkan	Jumlah kursi yang diperoleh
Dapil 1	Gunung Sugih	6.508	10	2
Dapil 1	Punggur	2.608		
Dapil 1	Seputih Raman	7.800		
Dapil 1	Seputih Banyak	6.489		
Dapil 1	Kota Gajah	2.817		
Dapil 1	Way Seputih	942		
Dapil 2	Rumbia	4.197	10	2
Dapil 2	Seputih Surabaya	4.655		
Dapil 2	Bandar Mataram	8.089		
Dapil 2	Bumi Nabung	2.241		

Dapil 2	Bandar Surabaya	4.665	10	2		
Dapil 2	Putra Rumbia	2.631				
Dapil 3	Kalirejo	3.540				
Dapil 3	Bangun Rejo	3.588				
Dapil 3	Trimurjo	7.469				
Dapil 3	Bumi Ratu Nuban	5.007				
Dapil 3	Bekri	2.847				
Dapil 3	Sendang Agung	6.719				
Dapil 4	Padang Ratu	6.632			8	2
Dapil 4	Pubian	4.680				
Dapil 4	Selagai Lingga	6.008				
Dapil 4	Anak Tuha	2.060				
Dapil 4	Anak Ratu Aji	1.768				
Dapil 5	Terbanggi Besar	10.316	12	3		
Dapil 5	Seputih Mataram	14.789				
Dapil 5	Terusan Nunyai	2.264				
Dapil 5	Seputih Agung	4.575				
Dapil 5	Way Pengubuan	3.474				

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Dari data diatas, bahwa total jumlah perolehan suara DPRD yang ada, peneliti membandingkan secara keseluruhan, Kecamatan Seputih Mataram merupakan jumlah suara DPRD untuk fraksi PDI-Perjuangan paling tertinggi dengan jumlah 14.789 suara. dan jumlah suara terendah di Kecamatan Way Seputih dengan jumlah 942 suara. Pelaksanaan Pendidikan Politik DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan diberbagai kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Lampung Tengah meliputi Kecamatan Terbanggi Besar, Seputih Mataram, Sendang Agung, Bumi Ratu Nuban, dan Bandar Mataram. Namun, penulis hanya membatasi di titik terbanyak dan terendah di karenakan dua wilayah tersebut merupakan wilayah kemenangan dan kekalahan partai PDI-Perjuangan pada pemilu 2019 yang lalu, sehingga DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah tentu akan fokus didua wilayah tersebut sebagai upaya strategis untuk meningkatkan perolehan suara di pemilu 2024 yang akan datang. Meskipun partai lain juga melaksanakan proses pendidikan politik ini kepada masyarakat. Tetapi dalam politik, apa lagi pemilihan legislatif, perolehan suara ini bisa saja di sebabkan oleh banyak faktor, misalkan money politik, kampaye hitam, dan lain sebagainya.

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini, yaitu terbuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis/tahun	Hasil Penelitian
1	Peran DPD Partai Golkar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Menjelang Pilkada Serentak 2020 Di Kota Mataram	Nurul Fajeri (2021)	Partai Politik memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan politik yaitu memberikan pendidikan politik kepada setiap warga negara dan warga negara juga berhak menerima pendidikan politik tersebut agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan khusus tersebut pelaksanaan fungsi partai politik dalam hal pelaksanaan pendidikan politik menjadi suatu yang sangat penting.
2	Implementasi Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Tinjau Dari Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang	Ifan Taufikurrohman (2019)	Pendidikan politik yang dilakukan oleh PPP Kota Malang sudah berjalan meskipun kurang begitu maksimal karena pelaksanaan tersebut dilakukan hanya menjelang agenda besar yaitu menjelang Pemilu, hal ini dapat dilihat dari perolehan suara PPP pada Pemilu legislatif Tahun 2019 yang turun drastis dibanding perolehan suara pada Pemilu Legislatif Tahun 2014.

3	Pelaksanaan Pendidikan Politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tegal	Dian Nugraheni (2017)	Pendidikan politik merupakan proses perencanaan nilai politik yang dilakukan secara sengaja dan terencana, baik yang bersifat formal maupun informal secara terus menerus dari generasi ke generasi agar masyarakat mempunyai pengetahuan, sikap, dan keterampilan politik. Pelaksanaan pendidikan politik melalui bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang pada tahun 2015-2020 yang terdiri dari 5 (lima) mantap, yaitu Mantap Ideologi.
---	--	-----------------------	---

(Sumber : Diolah Oleh Peneliti, 2022)

Dari uraian di atas, Ada beberapa pustaka yang peneliti temukan yang dapat dijadikan sebagai instrumen perbandingan dalam melakukan penelitian seberapa jauh peran partai, khususnya Partai PDI-Perjuangan dalam melakukan pendidikan politik. Hasil-hasil penelitian terdahulu antara lain :

Pertama, karya Nurul Fajeri (2021), penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Berisi tentang bagaimana peran DPD partai Golkar kota Mataram dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat menjelang pilkada serentak 2020 apakah partai politik sudah melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan memperhatikan materi dan metode pendidikan, masih berorientasi pada penguatan lembaga internal partai yang diarahkan sebagai upaya untuk memenangkan pilkada dan konsolidasi partai. Adapun indikator pendidikan politik yaitu pendidikan politik sebagai pembentuk karakter bangsa, sebagai pembangun kesadaran berpolitik, sebagai pembinaan kader parpol serta sebagai penanaman ideologi.

Kedua, karya Ifan Taufikurrohman (2019), Penelitian ini menjelaskan tentang, bagaimana pelaksanaan atau implementasi pendidikan politik oleh PPP Kota Malang belum begitu maksimal baik untuk kader maupun untuk masyarakat luas. Pendidikan politik yang dilaksanakan hanya menjelang agenda besar yaitu menjelang Pemilu baik Pilkada, Pileg dan Pilpres. Materi pendidikan politik yang disuguhkan partai politik masih kurang begitu maksimal atau kurang aplikatif. Hal ini berdampak pada perolehan suara PPP Kota Malang pada Pemilu 2019 menurun drastis bahkan sampai kehilangan lebih dari 50% suara dibandingkan pada perolehan suara pada pemilu 2014. Selain itu juga berdampak pada kualitas kader PPP dalam menjalankan fungsi dan tujuan partai, serta berpengaruh pada tingkat partisipasi politik masyarakat dalam memberikan hak politiknya.

Ketiga, karya Dian Nugraheni (2017), penelitian ini menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal bersifat formal dan informal. Pendidikan politik yang bersifat formal adalah dengan sasaran untuk internal struktural partai, sedangkan pendidikan politik secara informal dilaksanakan dengan sasaran struktural partai serta untuk masyarakat umum. Pelaksanaan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang pada tahun 2015-2020 yang terdiri dari 5 (lima) mantap, yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya. Kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal berhasil menduduki 8 (delapan) kursi legislatif pada Pemilihan Umum Legislatif Kota Tegal tahun 2014-2019. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tegal sudah melaksanakan pendidikan politik sesuai dengan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Berdasarkan beberapa tinjauan diatas dapat disimpulkan bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, yang dimana peneliti lebih memfokuskan bagaimana DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah dalam melakukan pendidikan politik untuk meningkatkan perolehan suara pada pemilu dengan berfokus pada Pendidikan politik formal melalui indikator kaderisasi, konsolidasi internal, seminar serta Pendidikan politik informal melalui sosialisasi, konsolidasi eksteral, sarasehan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yakni teori pendidikan politik. Metode yang digunakan oleh peneliti deskriptif, dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena dari permasalahan yang diteliti.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: Bagaimana Model Pendidikan Politik Yang Dilakukan DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui Bagaimana Model Pendidikan Politik Yang Dilakukan DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini di harapkan memberikan manfaat khususnya dalam bidang politik dan pemerintahan bagi mahasiswa program studi ilmu pemerintahan dan sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa dan masyarakat Pada Umumnya, Yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pendidikan politik kepada masyarakat dan Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran-gambaran pada pihak terkait seperti Pemerintah, Instansi terkait dan para pihak yang terkait dengan Pendidikan politik oleh DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Pendidikan Politik

2.1.1 Pengertian Pendidikan Politik

Menurut Gabriel Almond dalam Mas'ood (1986), pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Mohammad Nuh sebagaimana dikutip oleh Wayan Sohib (2009) mengatakan, pendidikan politik tidak terbatas pada pengenalan seseorang terhadap peran individu dalam partisipasinya dalam pemerintahan, partai politik dan birokrasi. Tetapi pada hakikatnya adalah terbangunnya proses pendewasaan dan pencerdasan seseorang akan tanggung jawab individu dan kolektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa sesuai otoritasnya yang mengandung makna mentalitas dan etika dalam berpolitik.

Menurut Surono sebagaimana dikutip Ramdlang Naning (1982:8), pendidikan politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti mencerdaskan kehidupan politik rakyat, meningkatkan kesadaran warga terhadap kepekaan dan kesadaran hak, kewajiban dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

Alfian (1990) mengidentifikasi pendidikan politik dalam arti kata yang longgar yaitu sosialisasi politik adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam. Jadi kalau boleh disimpulkan, pendidikan politik (dalam arti kata yang ketat) dapat diartikan usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka memahami dan

menghayati betul nilai– nilai politik yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Hasil penghayatan itu akan menghasilkan/melahirkan sikap dan tingkah laku politik baru yang mendukung sistem politik yang ideal itu, dan bersamaan dengan itu lahir pula kebudayaan politik baru.

Menurut Rusadi Kantaprawira (2006: 55) menyatakan bahwa pendidikan politik adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan politik rakyat dan agar mereka berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya. Pada pokoknya, rakyat perlu pendidikan politik secara kontinu (berkesinambungan) atas dasar nilai-nilai tertentu agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap masalah politik yang selalu mengalami perkembangan. Masalah pendidikan politik adalah masalah yang kompleks, bersegi banyak, berubah-ubah dan karena itu memerlukan pemikiran yang mendalam sehingga sangat diperlukan adanya pendidikan politik yang berkesinambungan (kontinu).

2.1.2 Fungsi dan Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik menurut Ruslan (2000:91) adalah, untuk membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan bertujuan kesadaran politik, sebagaimana juga untuk membentuk kemampuan dalam berpartisipasi politik pada individu, agar individu itu menjadi partisan politik dalam bentuk yang positif.

Tujuan pendidikan politik di Indonesia telah tercantum dalam salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidang politik di Indonesia yakni pada Pasal 31 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan tujuan pendidikan politik yaitu:

- 1) Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 2) Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- 3) Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara Persatuan dan kesatuan bangsa.

Tak jauh berbeda dengan tujuan pendidikan politik yang tercantum dalam pasal tersebut, Pasaribu (2017:57) menyebutkan bahwa "penyelenggaraan pendidikan politik harus dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, kemampuan bangsa, pengembangan pribadi itu, pendidikan politik harus mampu membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengenal permasalahan politik yang belum terpecahkan. Berkaitan dengan pendidikan politik pada lingkup persekolahan, Rifai (2011:30) menyebutkan bahwa "pendidikan politik lebih berorientasi pada bagaimana peserta didik menjadi manusia yang melek politik." Bahkan Pacho (2014:11) menyatakan "Melalui Pendidikan politik siswa bisa mengenal proses legislasi dan kewajiban politiknya." Bahwa melalui pendidikan politik, para siswa dapat berkenalan dengan proses legislatif serta kewajiban politik mereka. Secara lebih jauh, Kartono (1996:68) membagi tujuan diantaranya: pendidikan menjadi 2 bagian.

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - a. mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik;
 - b. berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang mantap;
 - c. aktivitasnya demokratisasi individu diarahkan atau pada perorangan, demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara; proses dan
 - d. bersedia memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.

2. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - a. peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya);
 - b. mengembangkan semua bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik);
 - c. agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

Secara umum, tujuan pendidikan politik dipaparkan oleh Kansil (dalam Pasaribu, 2017:56) ialah untuk "menciptakan generasi muda Indonesia yang Secara umum, tujuan pendidikan politik dipaparkan oleh Kansil (dalam Pasaribu, 2017:56) ialah untuk menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat." Hampir senada, Affandi (2011:2) menyebutkan bahwa "pendidikan politik memberikan bekal memperluas cakrawala pengetahuan politik dalam peserta, bertujuan rangka sebagai sumbangsih nyata dalam upaya penanaman nilai peradaban politik bagi pemuda dan rakyat pada umumnya." Kedua pendapat tersebut menarik benang merah bahwa pendidikan politik berupaya membangun manusia Indonesia seutuhnya dan mampu memiliki nilai-nilai serta pengetahuan politik dengan berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan politik berfungsi untuk mengubah atau membentuk tata laku pribadi individu dan membentuk suatu tatanan masyarakat yang diinginkan sesuai dengan tuntutan politik. Menurut Nasrullah dan Amril (2004), fungsi atau tujuan pendidikan politik adalah sebagai berikut:

1. Melatih orang muda dan orang dewasa menjadi warga Negara yang baik khususnya dalam fungsi *social* dan fungsi politik, seperti bias kerja sama: bersikap toleran, loyal terhadap bangsa dan Negara, bersikap sportif dan seterusnya demi kesejahteraan hidup bersama.
2. Membangkitkan dan mengembangkan hati nurani politik, rasa etika politik dan tanggung jawab politik, agar orang menjadi insan politik terpuji (bukan memupuk *egoism* dan menjadi bintang politik).
3. Agar orang memiliki wawasan kritis mengenai relasi-relasi politik yang ada di sekitarnya. Memiliki kesadaran bahwa urusan-urusan manusia dan struktur sosial yang ada ditengah masyarakat itu tidak permanen, tidak massif atau immanen sifatnya, tetapi selalu bias berubah dan dapat diubah melalui perjuangan politik.
4. Kemudian mampu mengadakan analisis mengenai konflik-konflik yang actual, lalu berusaha ikut memecahkan, jadi terdapat partisipasi politik. Urusan politik itu jelas membawa dampak kebaikan atau keburukan kepada rakyat banyak. Karena rakyat juga sangat berkepentingan dengan urusan pada umumnya .
5. Selanjutnya berpartisipasi politik dengan jalan memberikan pertimbangan yang konstruktif mengenai masyarakat dan kejadian politik itu merupakan hak-hak demokratis yang asasi. Hal yang perlu bukan hanya melancarkan proses-proses politik dari warga Negara dan pertanggungjawabannya untuk mengatur masyarakat dan Negara mengarah pada kehidupan yang sejahtera.

Menurut Affandi (1996), maksud diselenggarakan pendidikan politik pada dasarnya adalah untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa Indonesia. Pendidikan politik berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha pemahaman tentang nilai-nilai yang etis normatif,

yaitu dengan menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara.

Menurut Kartono (2009), melalui pendidikan politik diharapkan dapat membina karakteristik kepribadian Indonesia, yaitu berupa tindakan sebagai berikut:

1. Sadar akan hak, kewajiban, tanggung jawab etis/moril dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan memberikan keteladanan yang baik.
2. Dengan sadar menaati hukum dan UUD 1945, memiliki disiplin pribadi, disiplin sosial dan nasional, nasionalisme yang teguh dan tidak sempit atau *chauvinistic*.
3. Berpandangan jauh ke depan (*futuristik*), dengan tekad perjuangan mencapai taraf kehidupan bangsa yang lebih tinggi, berkeadilan dan berkeadilan, didasarkan pada kemampuan obyektif dan kekuatan kolektif bangsa Indonesia sendiri.
4. Aktif berpartisipasi, dan kreatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik.
5. Secara kesinambungan menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dengan kesadaran adanya keanekaragaman/pluriformitas suku-suku bangsa dan agama, serta mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.
6. Sadar akan perlunya memelihara lingkungan hidup manusia dan lingkungan alam sekitar agar lestari laras dan imbang (terjamin ekosistemnya) sebagai wadah kehidupan yang sehat.

2.1.3 Model Pendidikan Politik

Pelaksanaan pendidikan politik akan berkaitan dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan pada lapisan masyarakat. Usaha dari keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat terwujud jika tidak diimbangi dengan usaha yang nyata di lapangan. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini. Menurut (Ramdlon Naning, 1982) mengemukakan tentang model atau bentuk pendidikan politik, yakni:

- 1) Pendidikan politik formal yakni penanaman informasi-informasi, nilai-nilai, norma-norma atau praktek-praktek politik tertentu melalui Lembaga Pendidikan tertentu,
- 2) Pendidikan politik yang diselenggarakan tidak melalui pendidikan formal (informal), yaitu dalam lingkungan hidup sehari-hari misalnya dirumah, didalam kelompok bermain, dalam organisasi dan lebih luas lagi melalui media komunikasi massa (TV, Radio, Majalah, Surat Kabar) serta melalui kegiatan-kegiatan politik-politik praktis.

Sedangkan pendidikan politik yang baik adalah pendidikan politik yang memobilisasi simbol-simbol nasional, seperti sejarah, seni sastra, dan bahasa.”

Pendidikan politik secara formal yaitu model pendidikan politik yang dilakukan oleh partai secara formal dan mempunyai sifat legal dalam konstitusi partai dengan sasaran untuk internal struktural partai; yaitu anggota, kader, pengurus, dan petugas partai. Model pendidikan politik secara formal adalah sebagai berikut:

a. Kaderisasi

Kaderisasi adalah proses pendidikan politik melalui beberapa tahapan yang berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai dan ideologi sesuai dengan ideologi partai politik sehingga melahirkan kader yang kompeten. Kaderisasi dilakukan dengan sasaran internal partai maupun masyarakat

umum yang akan meneruskan jabatan struktural partai. Hal tersebut merupakan kewajiban selain diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai juga kebutuhan internal partai. Dengan adanya kaderisasi, pergantian struktur partai dapat senantiasa berkelanjutan memunculkan kader-kader baru yang kompeten.

b. Konsolidasi Internal

Konsolidasi adalah upaya untuk memperteguh atau memperkuat pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan demokrasi. konsolidasi internal dalam partai politik bertujuan untuk memperteguh, mempersatukan, dan memperkuat persatuan antar struktural di partai. Konsolidasi juga merupakan upaya untuk memperkuat atau menyolidkan para pengurus partai dalam menghadapi momentum politik tertentu.

c. Seminar

Seminar merupakan suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk membahas suatu masalah dan mencari solusi ilmiah terhadap permasalahan tersebut. Seminar juga diartikan sebagai suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan membahas suatu topik tertentu dan mencari solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya jawab. Seminar merupakan bentuk kegiatan pendidikan politik untuk internal partai.

Pendidikan politik secara informal dapat diartikan dengan proses Pendidikan politik yang dilakukan dengan konsep tidak formal melalui diskusi pada mimbar bebas dan pendekatan personal dengan sasaran struktural partai serta untuk masyarakat umum. Bentuk pendidikan politik secara informal adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti

belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat. Dalam suatu proses politik, sosialisasi politik menjadi suatu hal yang penting karena terdapat keterlibatan individu-individu sampai dengan kelompok-kelompok dalam satu sistem untuk berpartisipasi dalam sebuah proses politik. Sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepada generasi yang baru di suatu masyarakat tertentu.

b. Konsolidasi Eksternal

Konsolidasi Eksternal dilakukan dengan menguatkan hubungan antara partai dengan organisasi ataupun kelompok masyarakat lainnya di luar partai. Hal ini dilakukan agar dukungan terhadap partai dalam pemilu semakin besar lagi kedepannya. Konsolidasi eksternal bertujuan untuk memudahkan partai dalam melakukan program yang membutuhkan kerjasama dengan pihak lain, agar dapat berjalan dengan kondusif. Konsolidasi eksternal dilakukan tim sukses dengan melibatkan aktivis-aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penggiat desa, akademisi, organisasi sayap partai, relawan pendukung, wartawan dan pedagang kaki lima (PKL).

c. Sarasehan

Sarasehan ialah kegiatan bertukar pikiran yang membicarakan suatu masalah dan cenderung tidak mempunyai peraturan formal, dimana peserta akan membahas suatu topik tertentu yang ringan dan mengikuti hal-hal terkini. Maka diskusi sarasehan akan membutuhkan spontanitas dari para peserta diskusi. Kelebihan diskusi sarasehan ini akan menjadi daya tarik bagi peserta diskusi. Diskusi juga dapat dimanfaatkan sebagai medium pemecahan masalah atau mencari jalan keluar dari persoalan rumit yang tidak dapat diatasi secara individual.

2.2 Tinjauan Tentang Partisipasi

2.2.1 Pengertian Partisipasi

Partisipasi merupakan komponen penting dalam pembangkitan kemandirian dan proses pemberdayaan. Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya. Suatu realitas, bahwa dalam mewujudkan berbagai kepentingan dan anggota masyarakat acapkali harus berbenturan dengan kepentingan dan kebijaksanaan Negara. Benturan ini boleh jadi mencakup segala kepentingan seluruh anggota masyarakat, termasuk pula keinginan untuk berpartisipasi dalam masalah-masalah politik.

Partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama. Menurut Fithriadi, dkk. (1937) Partisipasi adalah pokok utama dalam pendekatan pembangunan yang terpusat pada masyarakat dan berkesinambungan serta merupakan proses interaktif yang berlanjut.

2.2.2 Pengertian Partisipasi Politik

Istilah Partisipasi politik diterapkan kepada aktivitas orang dari semua tingkat sistem politik; pemilih (pemberi suara) berpartisipasi dengan memberikan suaranya; menteri luar negeri berpartisipasi dalam menetapkan kebijaksanaan luar negeri. Kadang-kadang istilah tersebut lebih diterapkan pada orientasi politik daripada aktivitas politik; warga Negara berpartisipasi dengan menaruh minat dalam politik. Analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, yang akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama dalam hubungannya dengan negara-negara yang sedang berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara

aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*nya, dan sebagainya.

John Stuart Mill dalam Miriam Budiardjo (1994) menyatakan bahwa partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi “tertinggi dan serasi” dalam rangka menuju jalan kebebasan dan pengembangan diri. Di negara-negara demokratis, pemikiran yang mendasari konsep partisipasi politik ialah bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan.

2.2.3 Jenis-jenis Partisipasi Politik

Partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Studi-studi tentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku sebagai berikut :

- a. Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan dibagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan. Ikut dalam proses pemungutan suara adalah jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik lain, termasuk kegiatan membedakannya dari jenis-jenis partisipasi lain, termasuk kegiatan kampanye lainnya. Namun demikian, ada suatu kumpulan kegiatan-kegiatan yang berkaitan satu sama lain yang difokuskan sekitar siklus pemilihan dan pemungutan

suara dan dengan jelas dapat dibedakan dari bentuk-bentuk utama lainnya dari tindakan politik.

- b. *Lobbying* mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
- c. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuannya utama dan eksplisit adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.
- d. Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e. Tindak kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk mendefinisikannya sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Rousseau menyatakan bahwa “Hanya melalui partisipasi seluruh warga negara dalam kehidupan politik secara langsung dan berkelanjutan negara dapat terikat ke dalam tujuan kebaikan sebagai kehendak bersama.”

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam sistem Pemilu. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemilu, perhitungan cepat hasil pemilu (*quick count*), dengan ketentuan :

1. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu
2. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan pemilu
3. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas
4. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, tertib dan lancar.

Berbagai bentuk partisipasi politik tersebut dapat dilihat dari berbagai kegiatan warga negara yang mencakup antara lain:

- a. Terbentuknya organisasi-organisasi politik maupun organisasi masyarakat sebagai bagian dari kegiatan sosial, sekaligus sebagai penyalur aspirasi rakyat yang ikut menentukan kebijakan negara.
- b. Lahirnya lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai kontrol sosial maupun pemberi masukan terhadap kebijakan pemerintah.
- c. Pelaksanaan pemilu yang memberi kesempatan kepada warga negara untuk dipilih atau memilih, misalnya kampanye menjadi pemilih aktif, menjadi anggota DPR, menjadi calon presiden yang dipilih langsung dan sebagainya.
- d. Munculnya kelompok-kelompok kontemporer yang memberi warna pada sistem input dan output kepada pemerintah, misalnya melalui unjuk rasa, petisi, protes, demonstrasi, dan sebagainya.

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi partisipasi seseorang dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Myron Weiner paling tidak ada 5 faktor yang menyebabkan timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik ini :

- a. Modernisasi. Modernisasi di segala bidang berimplikasi pada komersialisasi pertanian, industrialisasi, meningkatnya arus urbanisasi, peningkatan tingkat pendidikan, meluasnya peran media massa dan media komunikasi. Kemajuan itu berakibat pada meningkatnya partisipasi warga negara, terutama di perkotaan, untuk turut serta dalam kekuasaan politik. Mereka ini misalnya kaum buruh, para pedagang dan para profesional.
- b. Terjadinya perubahan-perubahan struktur kelas esensial. Dalam hal ini adalah munculnya kelas menengah dan pekerja baru yang semakin meluas dalam era industrialisasi. Kemunculan mereka tentu saja

dibarengi tuntutan-tuntutan baru pada gilirannya akan mempengaruhi kebijakan- kebijakan pemerintah.

- c. Pengaruh kaum intelektual dan meningkatnya komunikasi massa. Ide-ide nasionalisme, liberalisme, dan egaliterisme membangkitkan tuntutan-tuntutan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
- d. Adanya konflik di antara pemimpin-pemimpin politik. Pemimpin politik yang saling memperebutkan kekuasaan, seringkali untuk mencapai kemenangan dilakukan dengan cara mencari dukungan massa. Dalam konteks ini seringkali terjadi partisipasi yang dimobilisasikan.
- e. Adanya keterlibatan pemerintah yang semakin meluas dalam urusan sosial, ekonomi dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup aktivitas pemerintah ini seringkali merangsang tumbuhnya tuntutan yang terorganisasi untuk ikut serta dalam mempengaruhi perbuatan keputusan politik. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari perbuatan pemerintah dalam segala bidang kehidupan.

2.3 Tinjauan Tentang Pemilu

2.3.1 Pengertian Pemilu

Abu Nashr Muhammad Al-Iman (2004:29) Menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilih dalam pemilu disebut juga sebagai konstituen, di mana para peserta Pemilu menawarkan janji-janji dan program-programnya pada masa kampanye. Kampanye dilakukan selama diwaktu yang telah ditentukan menjelang hari pemungutan suara. Setelah pemungutan suara dilakukan, proses penghitungan dimulai. Pemenangan Pemilu ditentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah ditetapkan dan disetujui oleh para peserta, dan disosialisasikan ke para pemilih. Proses pemilihan umum merupakan bagian dari demokrasi.

2.3.2 Hak Pilih dalam Pemilu

Pada azasnya setiap warga negara berhak ikut serta dalam Pemilihan Umum. Hak warga negara untuk ikut serta dalam pemilihan umum disebut Hak Pilih, yang terdiri dari:

- a. Hak pilih aktif (hak memilih)
- b. Hak pilih pasif (hak dipilih)

Setiap warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur tujuh belas tahun atau lebih atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih. Seorang warga negara Indonesia yang telah mempunyai hak memilih, baru bisa menggunakan haknya, apabila telah terdaftar sebagai pemilih.

Seseorang yang telah mempunyai hak memilih, untuk dapat terdaftar sebagai pemilih, harus memenuhi persyaratan:

- a) tidak terganggu jiwa/ ingatannya;
 - b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebaliknya seorang warga negara Indonesia yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan tersebut di atas, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
- Masalah dan gejolak seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat. Hal ini disebabkan karena tidak akuratnya data pemilih. Ada warga masyarakat yang

telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih, ternyata tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), malah sebaliknya orang-orang yang sudah meninggal dunia namanya masih tercantum dalam DPT. Sebenarnya masalah ini lebih bersifat teknis dan administratif, tetapi oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, masalah ini dipolitisasi sehingga tidak jarang menimbulkan gejolak dan konflik.

Berdasarkan pengamatan, ketidakakuratan pemilih/ DPT ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- b. Belum tertatanya dengan baik data kependudukan, yang mana hal ini merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri beserta jajarannya.
- c. Pemutakhiran data/ verifikasi data pemilih tidak dilakukan oleh KPU beserta jajarannya dengan baik.
- d. Masyarakat, dalam hal ini calon pemilih, tidak berusaha secara aktif, agar mereka tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

2.3.3 Kampanye dalam Pemilu

Kampanye Pemilu dilakukan dengan prinsip pembelajaran bersama dan bertanggungjawab. Kampanye Pemilu dilaksanakan oleh kampanye dan didukung oleh petugas kampanye serta diikuti oleh peserta kampanye. Pelaksana kampanye terdiri atas Pengurus Partai Politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta juru kampanye dan satgas. Peserta kampanye adalah warga masyarakat pemilih, sedangkan yang dimaksud petugas kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye.

Pelaksanaan kampanye harus didaftarkan pada KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS dan PPLN sesuai dengan tingkatannya. Pendaftaran kampanye ini ditembuskan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota meliputi visi, misi Partai Politik masing-masing.

Metode kampanye yang dilaksanakan oleh peserta Pemilu adalah dalam bentuk: a) Pertemuan terbatas; b) Tatap muka; c) Penyiaran melalui media cetak dan media elektronik; d) Penyebaran bahan kampanye kepada umum; e) Pemasangan alat peraga; f) Rapat umum; dan g) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran melalui media cetak dan media elektronik, penyiaran melalui radio dan/ atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dapat dilaksanakan sejak tiga hari kerja setelah peserta Pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu sampai dengan dimulainya masa tenang. Sedangkan rapat umum, dilaksanakan selama 21 hari kerja sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Ketentuan ini antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah “mencuri start”.

Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye secara Nasional, baik mengenai waktu, tata cara dan tempat kampanye di pusat, diatur dengan peraturan KPU. Sedangkan ketentuan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat provinsi diatur dengan keputusan KPU Provinsi dan mengenai waktu dan pelaksanaan kampanye di tingkat Kabupaten/ Kota, diatur dengan keputusan KPU Kabupaten/ Kota.

2.4 Tinjauan Tentang Partai Politik

2.4.1 Pengertian Partai Politik

Kata partai berasal dari kata *part* dalam bahasa latin, yang berarti “bagian”. Dalam kamus bahasa Inggris, kata *party* berarti pihak (misalnya dalam suatu perjanjian), *even sosial* (pesta), dan grup atau kelompok bersama. Berbeda dengan pengertian kata, partai (*party*) sebagai istilah umumnya tidak dibedakan oleh ilmuwan politik dari istilah partai politik (*political party*). Mereka mempergunakan kedua istilah ini untuk menunjuk entitas yang sama, yang mereka bedakan dari kelompok kepentingan (*interest group*) atau kelompok penekan (*pressure group*) yang tidak menjadi peserta dalam pemilihan umum (Ahmad Farhan Hamid, 2011:4).

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya (Miriam Budiardjo, 2013:404).

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, yaitu Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sigmund Neumann (dalam Budiardjo, 2008:414) dalam buku karyanya "*Modern Political Parties*" mengemukakan bahwa: Partai politik merupakan organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai pemerintahan dengan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan Budiardjo (2008:404) Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Dengan melihat beberapa definisi diatas, kiranya dapat dipahami bahwa partai politik merupakan suatu organisasi yang ada dalam suatu negara yang menjalani ideologi tertentu dan dibentuk dengan tujuan khusus yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, baik melalui pemilihan umum dan cara-cara lain yang sah untuk mendapatkan dukungan umum.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Partai Politik

Keberadaan partai politik ini tentunya memiliki fungsinya dalam Negara demokratis apabila fungsi partai politik berikut ini fungsional maka tidak ada istilah konflik, kecurangan, pembodohan, dan lainnya. Partai Politik sebagai organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tentunya Partai Politik memiliki tujuan dan fungsi yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu;

Tujuan umum Partai Politik adalah:

- 1). Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2). Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3). Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- 4). Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- 1). Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- 2). Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- 3). Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional. Adapun fungsi partai politik dapat dilihat

dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, yaitu partai politik berfungsi sebagai sarana : a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara; d. Partisipasi politik warga Negara Indonesia; dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Miriam Budiardjo (dalam Jimly Asshiddiqie, 2013:406-407) menyatakan bahwa fungsi partai politik terbagi menjadi empat, yaitu : a. Sarana komunikasi politik. Arus informasi dalam suatu Negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan partai politik dalam arus ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” dengan “mereka yang diperintah”. b. Sarana sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan suatu cara untuk memperkenalkan nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau dianut oleh suatu Negara, partai, atau organisasi. Proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana ia berada, prosesitu juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. c. Sarana rekrutmen politik. Proses melalui dimana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. d. Sarana pengatur konflik. Dalam Negara demokratis yang masyarakatnya bersifat terbuka adanya perbedaan dan persaingan pendapat sudah merupakan hal yang wajar. Tetapi dalam masyarakat yang sangat heterogen sifatnya maka perbedaan pendapat ini, apakah ini berdasarkan perbedaan etnis, status, sosial ekonomi atau agama, mudah sekali mengundang konflik. Pertikaian-pertikaian semacam ini dapat diatasi dengan bantuan partai politik. Sekurang-

kurangnya dapat diatur sedemikian rupa, sehingga akibat-akibat negatifnya seminimal mungkin. Namun dipihak lain, dilihat seringkali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada.

Adapun fungsi Partai Politik secara umum adalah sebagai sarana :

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia;
- dan e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

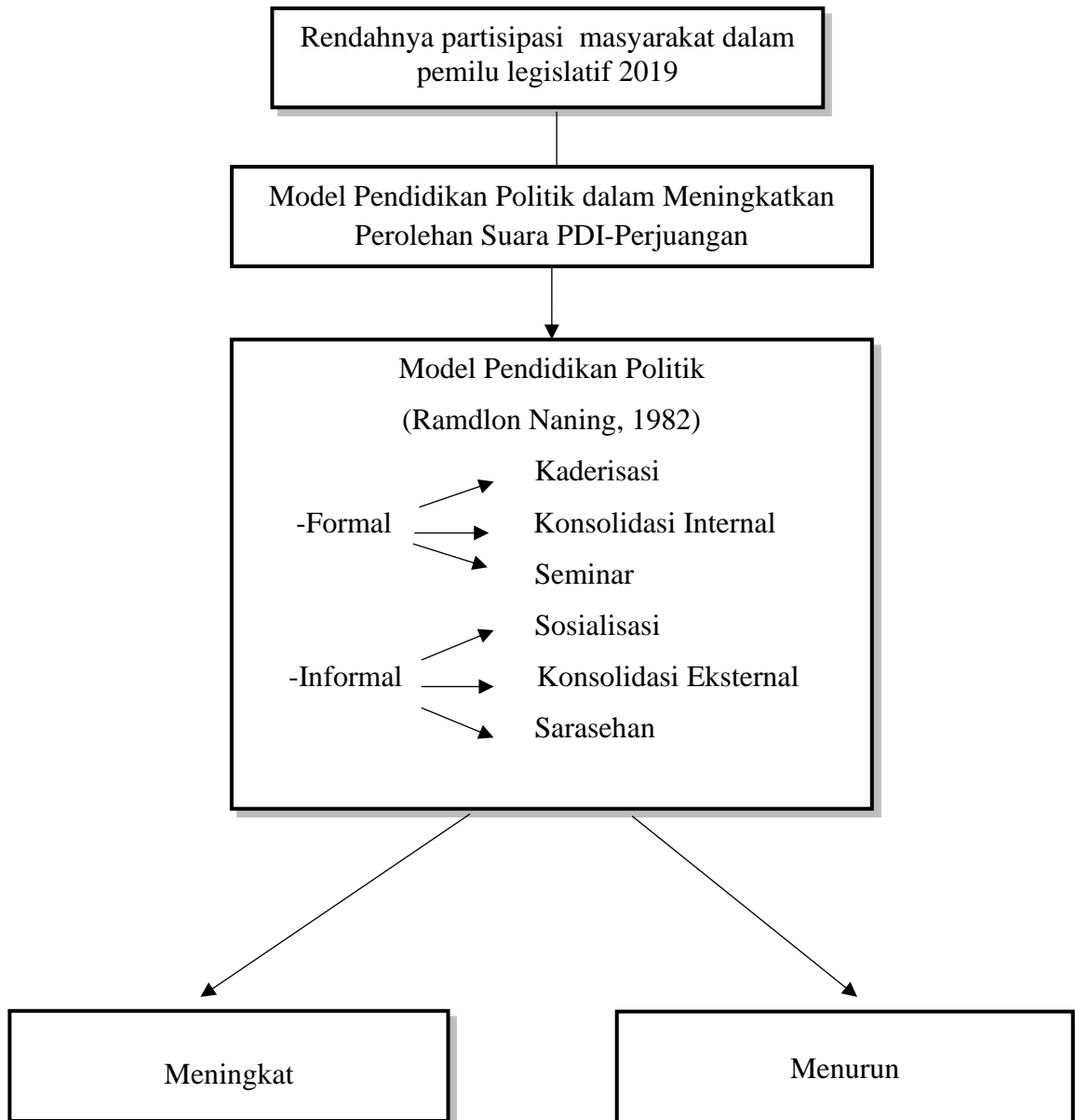
2.5 Kerangka Pikir

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem demokrasi. Partai politik berperan sebagai penghubung antara proses pemerintahan dengan warga negara. Oleh karena itu, partai politik merupakan pilar yang sangat penting untuk diperkuat perlembagaannya (*the degree of institutionalization*) dalam setiap sistem politik yang demokratis. Partai politik yang ada di Indonesia ini wajib memberikan pendidikan politik kepada masyarakat guna tercapainya pemilu yang demokratis. Pada dasarnya pendidikan politik tidak hanya ditujukan bagi calon-calon atau kader politik partai saja. Pendidikan politik hendaknya tidak hanya dilaksanakan ketika menjelang pemilu, namun harus secara berkesinambungan. Bagi generasi muda, pendidikan politik yang berkesinambungan penting untuk meningkatkan perbaikan sistem politik. Pendidikan politik senantiasa terus ditingkatkan guna tercipta kesepahaman bersama terhadap nilai-nilai serta arti berbangsa dan bernegara. Namun pada realitanya di Indonesia fungsi pendidikan politik ini belum berjalan sebagaimana mestinya, hal ini berdampak pada tingkat kecerdasan masyarakat di

dalam pengetahuan dan keterampilan berpolitik dari pemilu ke pemilu tidak ada peningkatan. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang masih belum bisa memandang bahwa pemilu adalah suatu hal yang penting diikuti.

Pada penelitian ini, peneliti berasumsi bahwa pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Pendidikan politik bertujuan untuk membentuk, menumbuhkan kepribadian politik dan bertujuan kesadaran akan berpolitik. Keberhasilan pendidikan politik tidak akan dapat tercapai jika tidak dibarengi dengan usaha yang nyata dilapangan. Penyelenggaraan pendidikan politik akan erat kaitannya dengan bentuk pendidikan politik yang akan diterapkan dimasyarakat nantinya. Oleh karena itu, bentuk pendidikan politik yang dipilih dapat menentukan keberhasilan dari adanya penyelenggaraan pendidikan politik ini. Di setiap keberhasilan memiliki hambatan dalam menjalankannya begitu pula dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk itu diperlukan upaya mengatasi hambatan tersebut. Apakah asumsi tersebut terbukti atau tidak, peneliti menggunakan teori pendidikan politik untuk memudahkan dalam menganalisis data.

Berikut ditampilkan visualisasi kerangka berpikir penelitian ini, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir
(Sumber: Diolah Oleh Peneliti, 2022)

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau interpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi) data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif dapat bersifat temuan potensi dan masalah, keunikan obyek, makna suatu peristiwa, proses dan interaksi sosial, kepastian kebenaran data, konstruksi fenomena dan temuan hipotesis.(Sugiyono, 2020).

Menurut (Farida, 2014: 102) Penelitian kualitatif lebih cocok untuk mengamati berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Jadi bukan merupakan suatu rekayasa dari peneliti. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami suatu kondisi dengan pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya dilapangan. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat menggali informasi secara langsung pada objek yang teliti dan dapat meng-eksplorasi secara mendalam informasi yang pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah. Maka untuk memahami fenomena secara mendalam, diperlukan interaksi sosial antara peneliti dengan objek yang diteliti, sehingga fenomena masalah mengenai tingkat kecerdasan masyarakat di dalam

pengetahuan dan keterampilan berpolitik. Hal ini tercermin dari sikap masyarakat yang masih belum bisa memandang bahwa pemilu adalah suatu hal yang penting diikuti dapat diuraikan dengan metode penelitian kualitatif dengan cara ikut berperan serta, melakukan wawancara dan menganalisis secara mendalam terhadap fenomena atau gejala yang terjadi pada objek yang diteliti.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode penelitian deskriptif kualitatif, metode kualitatif adalah sebuah metode untuk penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan untuk meneliti suatu kondisi obyek yang alamiah, (eksperimen adalah sebagai lawannya) instrument kunci adalah peneliti itu sendiri, sedangkan teknik pengumpulan datanya menggunakan triangulasi (gabungan), sifat dari analisis data yaitu induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih menekankan di bagian maknanya dari pada bagian generalisasi (Sugiyono, 2019).

Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen.

Melalui penelitian kualitatif deskriptif, peneliti bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) melalui Pendekatan Deskriptif peneliti dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara Faktual pada objek penelitian yang diteliti.

Oleh karena itu, penelitian ini memilih metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena sesuai dengan masalah yang dilihat, dan penelitian ini akan mendeskripsikan Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah. Dipilihnya DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah sebagai lokasi penelitian karena DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah adalah salah satu partai dominan atau partai kemenangan yang menduduki kursi legislatif paling banyak di Lampung Tengah pada pemilu legislatif 2019, sehingga dapat mudah memberikan Pendidikan Politik kepada Masyarakat.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian menurut Spradley dalam buku Sugiyono (2019: 275) menyatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif, menentukan fokus penelitian berdasarkan hasil studi pendahuluan, pengamatan, referensi dan disarankan oleh pembimbing atau orang yang dipandang ahli (Sugiyono, 2019).

Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah dengan melihat teori Model Pendidikan Politik dari Ramdlon Naning, 1982 dengan yang berfokus pada Pendidikan politik formal melalui indikator kaderisasi, konsolidasi internal, seminar serta Pendidikan politik

informal dengan melihat dari segi sosialisasi, konsolidasi eksternal dan serasehan. Dengan teori yang digunakan tersebut maka akan dilihat apakah Kuantitas perolehan suara pada pemilu legislatif 2019 terjadinya suatu peningkatan atautkah terjadinya suatu penurunan.

1 Pendidikan Politik Formal

a. Kaderisasi

Kaderisasi adalah proses pendidikan jangka panjang untuk pengoptimalan potensi-potensi kader dengan cara mentransfer dan menanamkan nilai-nilai atau ideologi tertentu di dalam sebuah partai hingga nantinya akan melahirkan kader-kader yang tangguh. Kaderisasi merupakan kebutuhan internal organisasi partai yang sangat wajib dilakukan.

b. Konsolidasi Internal

Konsolidasi internal dalam partai politik bertujuan untuk memperteguh, mempersatukan, dan memperkuat persatuan antar struktural di partai. Konsolidasi juga merupakan upaya untuk memperkuat atau menyolidkan para pengurus partai dalam menghadapi momentum politik tertentu.

c. Seminar

Seminar diartikan sebagai suatu pertemuan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan membahas suatu topik tertentu dan mencari solusi terhadap permasalahan dengan cara interaksi tanya jawab. Seminar merupakan bentuk kegiatan pendidikan politik untuk internal partai dan juga masyarakat.

2 Pendidikan Politik Informal

a. Sosialisasi

Sosialisasi pada umumnya dipahami sebagai sebuah proses belajar, kondisi ini terjadi karena pada dasarnya sifat manusia adalah tidak akan pernah puas untuk belajar sesuatu hal yang belum diketahuinya, seperti belajar mengenai peran, norma dan nilai untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sosialnya. sosialisasi merupakan proses dengan mana seseorang belajar menjadi anggota masyarakat.

b. Konsolidasi Eksternal

Konsolidasi dalam arti luas adalah upaya untuk memperteguh atau memperkuat pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dan pengembangan kehidupan demokrasi. Konsolidasi eksternal dilakukan tim sukses dengan melibatkan aktivis-aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), penggiat desa, akademisi, organisasi sayap partai, relawan pendukung, wartawan dan pedagang kaki lima (PKL).

c. Sarasehan

Sarasehan ialah kegiatan bertukar pikiran yang membicarakan suatu masalah dan cenderung tidak mempunyai peraturan formal, dimana peserta akan membahas suatu topik tertentu yang ringan dan mengikuti hal-hal terkini. Maka diskusi sarasehan akan membutuhkan spontanitas dari para peserta diskusi. Kelebihan diskusi sarasehan ini akan menjadi daya tarik bagi peserta diskusi. Diskusi juga dapat dimanfaatkan sebagai medium pemecahan masalah atau mencari jalan keluar dari persoalan rumit yang tidak dapat diatasi secara individual.

3.5 Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen, menurut (Sugiyono, 2019: 225).

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

1 Data Primer

Dalam penelitian kali ini, data yang dihimpun oleh penulis adalah tentang bagaimana Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah. Data

diperoleh melalui Wawancara dengan sejumlah pegawai dan ketua yang ada di DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah. Data tersebut akan berupa hasil jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti melalui wawancara langsung.

2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan peneliti dari berbagai laporan – laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan peneliti. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan peneliti adalah data yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen penting atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian.

3.6 Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan peneliti ini adalah informan terpercaya yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah.

1. Loekman Djoyosoemarto Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah
2. Sumarsono Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah Fraksi PDI-Perjuangan Lampung Tengah
3. Yogi Dwi Saputra Kepala Sekertariat DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah
4. Kadek Joko Supriyatin, S.Ap M.M anggota DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah
5. Amelia Kartini, S.A.N Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas KPU Lampung Tengah
6. Sobirin Anom Masyarakat Kabupaten Lampung Tengah

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan peneliti turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226).

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan bagaimana Bagaimana Model Pendidikan Politik Yang Dilakukan DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019. Observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan, yakni pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah.

2 Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dengan terwawancara dalam sebuah pembicaraan. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide

(panduan wawancara). Dalam kali ini pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah.

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Serta Pada wawancara kali ini peneliti menggunakan tipe pendekatan wawancara semi – terstruktur, yang tujuannya adalah untuk dapat menemukan atau mengungkap masalah secara terbuka. Terlebih mengingat masalah yang terjadi begitu kompleks dan untuk mendapatkan jawaban dari informan maka diperlukan wawancara yang sifatnya agak terbuka, tidak terlalu Kaku, dan Flexible. Namun tetap mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat terstruktur. Sehingga dalam proses penggalian informasi penelitian akan lebih mudah untuk menggali permasalahan lebih dalam, tanpa harus terlalu kaku dalam melakukan wawancara.

3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, handphone untuk keperluan recording, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

3.8 Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Efendi dkk dalam Singarimbun (2008:240) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari:

1 Editing Data

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu peneliti mengumpulkan data-data yang menarik Interpretasi data dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

2 Interpretasi Data

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

3.9 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami

oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2020). Analisis data merupakan hal yang bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Karena analisis di gunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesa dapat di kembangkan dan di evaluasi.

Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan konsep analisis data model Miles Dan Huberman. Analisis data ini meliputi data, Reduction, Display, dan Conclusion Drawing/Verification. Maka akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih atau memilah pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani et Al, 2020: 163).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu peneliti dalam proses penelitian melakukan penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

2. Data Display (Penyajian Data)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani et Al, 2020: 167).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk Uraian Singkat, Bagan, Hubungan antar Kategori, Flowchart dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

3. Conclusion Drawing/Verification

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, peneliti berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan Model Pendidikan Politik Yang Dilakukan DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019.

3.10 Teknik Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada peneliti (Sugiyono, 2019: 267). Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas (Credibility)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu peneliti melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019: 270).

2. Uji keteralihan (Transferability)

Dalam membuat laporannya, peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (transferability), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019: 276-277).

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah), maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Model Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Perolehan Suara PDI-Perjuangan dengan melakukan kegiatan pendidikan politik berupa :

A. Pendidikan Politik Formal

1. Kaderisasi

Kegiatan dilakukan dengan metode penyampaian materi oleh pemateri yang berasal dari anggota DPRD fraksi PDI-Perjuangan Materi yang diberikan terkait pendalaman 4 (empat) pilar kebangsaan bernegara, aspek internalisasi ideologi, visi dan misi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), strategi pemenangan pemilu, komunikasi dengan media dan juga publik speaking yang bersifat sederhana dalam mempengaruhi citra PDI-Perjuangan di lingkungan masyarakat.

2. Konsolidasi internal

Konsolidasi internal yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah pada awal tahun dan akhir tahun 2018 di Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Konsolidasi dan rapat koordinasi bersama seluruh PAC, beserta badan dan sayap partai untuk sinkronisasi upaya pemenangan dengan tahapan dan langkah yang bisa memperoleh suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu 2019

3. Seminar

Pendidikan politik seminar oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah dilaksanakan dua kali dalam satu tahun atau kondisional melihat isu yang terjadi pada saat itu. Seminar ini bersifat tematik, yaitu isinya terkait

dengan isu-isu yang muncul pada saat itu. Materi utama dalam seminar ini tentunya harus mengandung unsur membumikan Pancasila. Seminar tersebut mempunyai muatan pendidikan politik yang terkandung didalamnya, yaitu terciptanya pemahaman bagi kader atas berbagai permasalahan yang berkembang dimasyarakat

B. Pendidikan Politik informal

1. Sosialisasi

Pendidikan politik sosialisasi yang dilakukan oleh DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah dengan melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) sekaligus memperkenalkan program kerja partai mengenai visi misi.

2. Konsolidasi eksternal

Konsolidasi eksternal dilakukan oleh partai dan tim sukses di mulai setiap sebelum kegiatan kampanye dan sosialisasi dimulai pertemuan antara partai dan tim sukses kampanye disetiap kecamatan dimana akan membahas dan mensosialisasikan kampanye yang digunakan, target-target yang harus dicapai, dan pesan-pesan dan isu topik yang akan diangkat pada setiap kegiatan. Adapun cara yang dilakukan pemasangan baliho, memberikan bantuan sosial dan memberikan edukasi melalui media sosial.

3. Sarasehan

Pendidikan politik sarasehan yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah dengan menyapa rakyat sekaligus melakukan dialog politik mengenai permasalahan yang ada, apa yang menjadi kebutuhan rakyat, atau apa yang jadi kesulitan rakyat yang nantinya kami akan memberikan solusi dalam permasalahan tersebut. Upaya kami lakukan bertujuan untuk menarik kepercayaan masyarakat kepada partai sehingga pada saat pemilu bisa memilih PDI-Perjuangan.

Adapun dari kedua model Pendidikan politik yang diberikan PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah sudah berjalan dengan baik namun ada indikator yang masih belum maksimal di indikator pendidikan politik Informal yaitu

sosialisasi dikarenakan sosialisasi yang dilakukan DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah belum merata di beberapa wilayah Lampung Tengah, dikarenakan luas wilayah dan akses jalan yang rusak.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Model Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Perolehan Suara Pada Pemilu Legislatif 2019 (Studi Pada DPC PDI-Perjuangan Lampung Tengah), peneliti memandang bahwa apa yang dilakukan oleh PDI-Perjuangan telah berusaha memberikan pemahaman pendidikan politik dengan baik. Peneliti memberikan saran yaitu:

DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Lampung Tengah diharapkan untuk lebih mengupayakan sosialisasi secara merata sehingga masyarakat lebih memahami politik. Karena dengan memahami politik, maka masyarakat akan memberikan kontribusi yang baik untuk pengambilan kebijakan dalam memilih bahwa mengikuti kegiatan politik itu penting untuk diikuti, karena suara masyarakat sangat penting untuk masa depan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Affandi, Idrus. (1996). Pendidikan Politik.. Bandung : Mutiara Press.
- Affandi Idrus. (2011). Pendidikan Politik.. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia
- Ahmad Farhan Hamid. (2011) Partai Politik Lokal di Aceh, Jakarta : Kemitraan.
- Ahyar, Hardani et al. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Alfian (1990). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia, Kumpulan Karangan, Jakarta: PT.Gramedia
- Bogdan dan Taylor. (2012). Prosedur Penelitian. Dalam Moleong, Pendekatan Kualitatif. (him. 4). Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. (1994). Demokrasi di Indonesia Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kantaprawira, Rusadi. (2006). Sistem Politik Indonesia. Jakarta: Sinar Baru
- Kartono, Kartini. (2009). Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa. Bandung: Mandar Maju.
- Naning, Ramdlang, (1982). Pendidikan Politik dan Regenerasi, Jakarta: Liberty.

Mas’Oed, M., & Andrews, C. (1986) Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Miriam Budiardjo, (2008) Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.

Muhammad Rifai. (2011). Politik Pendidikan Nasional, Jakarta: Ar-Ruz Media.

Nazsir. Nasrullah dan Amril Ghaffar Sunny. (2004) Partai Politik, Partisipasi Politik dan Pendidikan Politik. Bandung: PPS FISIP UNPAD.

Nugrahani, Farida. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Solo: Cakra Books.

Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. (2008). Metode Penelitian Survei, Jakarta: LP3ES.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.

Jurnal

Aprillio Poppy Belladonna. (2018). Implementasi Fungsi Partai Politik Sebagai Wahana Pendidikan Politik Di Masyarakat. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan. Volume 2, Nomor 2, Desember.

Asmika Rahman. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 10, No. 1. 44-51.

Djuyandi Yusa. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislative Oleh Komisi Pemilihan Umum. Vol. 5 No. 2

- Dwira Kharisma. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 1. No. 7. Hal. 1144.
- Elisabeth Sitepu. (2016). Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains*. VoL.2 No.1
- Iyep Candra Hermawan. (2020). Implementasi Pendidikan Politik Pada Partai Politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum dan Kewarganegaraan*. Volume 10 No. 1 Edisi Maret.
- Laily Purnawat. (2018). Pendidikan Politik Sebagai Upaya Peningkatan Kesadaran Politik Masyarakat. *Jurnal Publiciana*. Vol. 11 No. 1. Hal.55-71. (Studi di Kantor KPU Kabupaten Tulungagung)
- Payerli Pasaribu. (2017). Peranan Partai Politik dalam Melaksanakan Pendidikan Politik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*. Vol. 5 No. 1. Hal. 51-59.
- Setiyanti Anis. (2022). Penerapan Praktik Diskusi Sarasehan Dengan Pendekatan Community Development. Vol. 5 No. 1
- Sugiarto Bowo. dkk. (2014). Strategi Pemenangan Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Vol. 27 No. 3

Skripsi

- Afen Sandika. (2018). Peran PDI Perjuangan Dalam Pendidikan Politik Masyarakat Menjelang PILKADA Mesuji Tahun 2017. Jurusan Pemikiran Politik Islam. Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama.

Dian Nugraheni. (2017). Pelaksanaan pendidikan politik Oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Tegal. Jurusan Ilmu Hukum. Fakultas Hukum.

Edi Yanto. (2014). Analisis Peran Dan Fungsi Partai Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat Di Kabupaten Nagan Raya. Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Listiati Nainggolan. (2013). Hubungan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2010 Di Bandar Lampung (Studi pada Kelurahan Palapa Kecamatan Tanjung Karang Pusat). Jurusan Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Nurul Fajeri. (2021). Peran DPD Partai Golkar Dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik Menjelang Pilkada Serentak 2020 di Kota Mataram. Jurusan Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Ifan Taufikurrohman. (2019). Implementasi Pendidikan Politik Dalam Rangka Meningkatkan Perolehan Suara Pemilu 2019 Di Tinjau Dari Pasal 31 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PARTAI POLITIK (Studi di Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kota Malang). Jurusan Magister Ilmu Hukum. Fakultas Direktorat Program Pascasarjana.

Berita

<https://m.merdeka.com/peristiwa/angka-golput-di-pileg-lebih-tinggi-dari-pilpres.html>

Peraturan Perundang-Undangan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2
TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH